

KOMUNITAS WARIA DAN POLITIK MORALITAS PEMERINTAH ORDE BARU DI JAKARTA TAHUN 1968-1998

Aditya Wahyu Al Fikri

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

alfikriaditya1@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi kehidupan komunitas waria di Jakarta, menganalisis komunitas waria di tangan Gubernur Ali Sadikin, dan praktik politik moralitas yang diterapkan pemerintah Orde Baru untuk membatasi ruang gerak komunitas waria di Jakarta tahun 1968-1998. Penelitian ini akan disajikan dengan menggunakan metode historis sebagai landasan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan *interdisipliner* dari ilmu-ilmu sosial, yaitu studi gender, sosial, dan kultural, sehingga metode sejarah didukung dengan teori gender, sosiologi, dan antropologi. Ketiga pendekatan ilmu sosial tersebut dianggap cocok untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa terjadinya kesenduan komunitas waria di Jakarta tahun 1968-1998?. Komunitas waria mendapatkan perhatian khusus pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1968. Gubernur Ali Sadikin selalu mengikutsertakan komunitas waria sebagai partisipan pameran Jakarta Fair dengan menari, menyanyi, dan sulap pada tahun 1968. Komunitas waria mengalami keredupan dalam eksistensinya dengan adanya politik moralitas yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1974. Komunitas waria mendapatkan perlakuan intoleransi dari masyarakat dengan diterapkannya politik moralitas yang dilakukan. Politik moralitas yang diterapkan pemerintah Orde Baru membentuk konsep ideologi gender maskulinitas dan feminitas yang mengatur masyarakat Indonesia dalam berpakaian dan bertingkah laku. Pemerintah menerapkan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) untuk merazia komunitas waria yang melakukan *nyebong* di pinggir jalan dan rel kereta api.

Kata kunci: Komunitas Waria, Ali Sadikin, Pemerintah Orde Baru, Politik Moralitas.

Abstract

The aim of this research is to reconstruct the life of the waria community in Jakarta, analyzing the waria community in Governor Ali Sadikin, and the political morality practices implemented by the New Order government to limit the movement of the waria community in Jakarta in 1968-1998. This research will be presented using historical methods as a research basis. This research uses an interdisciplinary approach from the social sciences, namely gender, social and cultural studies, so that historical methods are supported by gender theory, sociology and anthropology. These three social science approaches are considered suitable for answering the question of how and why the waria community experienced loneliness in Jakarta in 1968-1998. The waria community received special attention during the administration of Governor Ali Sadikin in 1968. Governor Ali Sadikin always included the waria community in

participating in the Jakarta Fair exhibition with dancing, singing and magic in 1968. The waria community experienced a decline in its existence due to the morality politics implemented by the New Order government in 1974. The waria community receives intolerant treatment from society with the implementation of morality politics. The morality politics implemented by the New Order government formed the concept of gender ideology of masculinity and femininity which regulated Indonesian society in how they dressed and behaved. The government implemented the National Disciplinary Movement (NDM) to raid the waria community who were carrying out nyebong on the side of the road and train tracks.

Keywords: *Waria Community, Ali Sadikin, New Order Government, Politics of Morality.*

PENDAHULUAN

Wanita pria (waria)/khunsa/banci/bencong/becak/wadam merupakan perubahan tingkah laku dan kejiwaan dari maskulin menjadi feminin atau sebaliknya (Rowe, 2007: 1). Waria dengan gay adalah sebuah konotatif yang berbeda. Entitas waria merupakan sebuah kelompok yang berpakaian dan bergaya seperti perempuan, sedangkan gay berpakaian dan bergaya seperti laki-laki normal pada umumnya dengan orientasi seksualnya sesama jenis. Waria dilihat dari identitas gender merupakan perpaduan kombinasi dari feminin dan maskulin yang dimiliki oleh seorang laki-laki berjiwa perempuan (Aksi, 1998: 1). Mereka merasa bahwa jiwa mereka yang feminin telah terjebak di dalam tubuh laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa waria tidak dapat digolongkan dalam sebuah identitas seksual, tetapi identitas gender. Identitas gender untuk waria, yaitu gender ketiga karena dapat mengkombinasi feminitas dengan maskulinitas (Oetomo, 1996: 48). Kombinasi tersebut membuat mereka menjadi ciri khas dan berbeda dari masyarakat lainnya.

Pemerintah Orde Baru yang memulai pembangunan ekonomi pasca kerusuhan 1965 melakukan kerja sama dengan beberapa negara Barat, salah satunya adalah Amerika. Amerika merupakan salah satu negara yang menggaungkan hak asasi manusia, sehingga Indonesia mau tidak mau mengikuti arus politik luar negeri untuk menerapkan hak asasi manusia. Penerapan hak asasi manusia di Indonesia dilakukan oleh pemerintah Jakarta dengan memerhatikan komunitas waria (Berita Yudha, 1982:

1). Komunitas waria mulai mendapatkan perhatian dari Gubernur Ali Sadikin dengan mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka. Gubernur Ali Sadikin menganggap bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat Jakarta yang keberadaannya harus diperhatikan dengan membimbing dan memberikan pelatihan yang sesuai dengan bakatnya. Komunitas waria mulai menggapai feminitas modern dengan bebas tampil terbuka dengan sentuhan *dendong* (dandan) dan mengenakan pakaian wanita di setiap acara (Hegarty, 2017: 11).

Praktek *dendong* membuat komunitas waria sering diejek *banci kaleng* atau *bencong* karena gaya mereka yang feminin. Frekuensi dan ruang gerak mereka sudah tidak bebas dan sering di razia oleh aparat kepolisian. Aparat kepolisian sering merazia tempat *nyebong* mereka di kawasan Taman Anggrek, Pesing, Pulomas, Cengkareng, Bandengan Utara, Rawabadak, Prumpung, Manggarai, dan Cawang Bawah. Sebagian dari mereka kembali *nyebong* di pinggir jalan dan sepanjang rel kereta api pada malam hari. Operasi tersebut telah menangkap 10 orang waria dan 4 orang wanita tuna susila yang semuanya dibawa ke Komwil 71 Kramat untuk diperiksa. Waria yang ditangkap oleh polisi Komwil 71 rata-rata berusia 20 tahun (*Kompas*, 1969: 5).

Komunitas waria mencapai 15.000 orang dari jumlah penduduk Jakarta sebanyak 4,2 juta penduduk pada tahun 1968 (*Kompas*, 1968: 2). Gubernur Ali Sadikin dalam menangani permasalahan waria yang mengganggu keindahan sudut kota Jakarta dengan memberikan fasilitas tempat berkumpul untuk para komunitas waria, yaitu di *Paradise Hall*. *Paradise Hall* adalah merupakan stand yang didesain seperti mini bar yang berlokasi di Jakarta Fair pada tahun 1968. Gubernur Ali Sadikin memberikan kewenangan komunitas waria untuk mengelola mini bar tersebut untuk pemasukan keuangan mereka (*Moderna*, 1969: 35). Gubernur Ali Sadikin juga memberikan mereka pelatihan pekerjaan, seperti pelatihan merias pengantin, menjahit, salon, dan berakting. Adanya pelatihan ini diharapkan dapat menjadi pendapatan untuk komunitas waria dan tidak melakukan praktik prostitusi/mangkal (*nyebong*) di pinggir jalan atau di sepanjang rel kereta setiap malam hari.

Kesenduan komunitas waria terulang kembali ketika turunnya Ali Sadikin sebagai gubernur Jakarta pada tahun 1977 dan diaturnya politik moralitas oleh pemerintah Orde Baru dengan mendukung ideologi gender. Peran Orde Baru dalam menerapkan politik moralitas masyarakatnya diatur dengan Undang-Undang (UU) Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa gender laki-laki merupakan kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. UU tersebut mengatur pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan dan mengatur politik seksualitas heteroseksual di Indonesia. Secara tidak langsung, UU tersebut hanya mengakui hubungan perempuan dan laki-laki yang seksualitasnya diakui oleh negara. Adanya pembaruan tersebut membuat komunitas waria mendapatkan diskriminasi berupa ejekan dan cacian dari masyarakat (Rokhim, 2019: 116).

Penelitian ini difokuskan antara tahun 1968 sampai 1998 karena beberapa alasan, yaitu: Tahun 1968 merupakan tahun dilirikinya komunitas waria oleh gubernur Ali Sadikin dengan memberikannya fasilitas dan pelatihan. Sedangkan, tahun 1998 merupakan diterapkannya politik moralitas oleh pemerintah Orde Baru yang membatasi ruang gerak komunitas waria di Jakarta tahun 1968-1998.

Untuk selanjutnya perlu dipertanyakan (1) bagaimana rekonstruksi kehidupan komunitas waria di Jakarta tahun 1968-1998? (2) bagaimana keadaan komunitas waria di tangan Gubernur Ali Sadikin? (3) bagaimana penerapan politik moralitas yang dilakukan pemerintahan Orde Baru 1968-1998?

METODE

Metode yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu menggunakan metode historis, karena mengkaji mengenai peristiwa masa lampau dalam suatu periode. Penelitian ini menggunakan pendekatan *interdisipliner* ilmu-ilmu sosial, yaitu pendekatan gender dan sosiologi. Kedua pendekatan tersebut mendukung metode sejarah secara konseptual menggunakan teori sosiologi dan studi gender (Kartodirdjo,

2016: 13). Pendekatan tersebut digunakan karena berdasarkan pertimbangan dari objek kajian dan untuk meningkatkan efektivitas penelitian.

Metode sejarah dibagi menjadi empat tahapan, yaitu heuristik (mencari sumber), kritik sumber (eksternal dan internal), interpretasi (menafsirkan), dan historiografi (penulisan kembali sejarah) (Daliman, 2015: 29). Peneliti dalam memperoleh sumber primer untuk digunakan yang berkaitan dengan kesenduan komunitas waria di Jakarta pada tahun 1968-1998 diantaranya koran-koran sezaman, majalah-majalah sezaman, *Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, dan foto-foto mengenai kontes komunitas waria di Jakarta tahun 1968-1998. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian, dan penelitian terdahulu yang mengenai komunitas waria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunitas waria dalam memahami dirinya sebagai homoseksual dibentuk dengan cara seksologis Barat dan literatur psikiatri yang telah beredar sejak zaman kolonial (Boellstorff, 2007: 50). Pemerintah kolonial menemukan bukti adanya persimpangan gender dengan ditemukannya sejumlah masyarakat pribumi berjenis kelamin laki-laki mengenakan pakaian perempuan dan diberikan julukan yang merendahkan dengan konotatif negatif, yaitu banci atau bencong (Isnani, 2022: 5). Eksistensi banci telah diberitakan oleh surat kabar *Sinar Terang* yang dimuat dalam artikelnya bahwa terdapat seorang banci yang bernama Djaidan dari Batavia rumahnya telah dirampok (*Sinar Terang Betawi*, 1889: 3). Banci sangat mudah ditemui di tempat umum dengan melakukan praktik *nyebong* pada abad ke 20. Keberadaan mereka yang meresahkan membuat polisi melakukan penangkapan dua orang banci yang berasal dari Tanah Abang (*Pemberita Betawi*, 1901: 2). Waria dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan oleh pemerintah Belanda.

Seorang dokter kejiwaan bernama dr. Amir mengatakan bahwa mereka mengenakan kebaya, berambut panjang, dan kain batik untuk kegiatan sehari-hari. Mereka berjalan berlenggak-lenggok dan memiliki suara tinggi seperti seorang wanita, sehingga mereka dijuluki seorang “banci atau bencong” pada zaman kolonial Belanda yang memiliki makna rendahan dan ejekan. Menurut dr. Amir, para banci memiliki keahlian pekerjaan yang sering dilakukan oleh wanita, seperti memasak, menjahit, dan tukang cuci. Ia juga menuturkan bahwa para banci memiliki bentuk penyimpangan seksual yang aneh karena sering menggunakan peran *cross-dressing* (*Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, 1934: 1081-1082).

A. Hadirnya Komunitas Waria di Jakarta Tahun 1968-1998

Migrasi besar-besaran penduduk desa ke Jakarta terjadi akibat kekacauan dan kesengsaraan selama masa resesi ekonomi tahun 1930, pendudukan Jepang, revolusi fisik, dan pemberontakan DI/TII di daerah pedesaan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Masyarakat banyak yang melakukan urbanisasi dari desa ke kota Jakarta untuk memperbaiki hidup mereka pada tahun 1960-an (Suparlan, 1984: 25). Pemerintah Orde Baru membuat kebijakan ekonomi dengan menjadikan Jakarta sebagai kawasan industri pada tahun 1970-an. Jakarta mendapatkan perhatian khusus karena sebagai kota induk dengan banyaknya pusat-pusat pembangunan baru sebagai kota metropolitan (Ramadhan, 1993: 85).

Jakarta sebagai ibukota negara memiliki kedudukan sebagai pintu gerbang berhubungan dengan dunia luar dan masuknya berbagai macam nilai, seperti ideologi, politik, dan kebudayaan. Adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Jakarta membuat masyarakat daerah luar Jakarta berbondong-bondong untuk datang ke Jakarta, salah satunya entitas waria. Pembangunan ekonomi beriringan dengan kepekaan pemerintah terhadap hak asasi manusia dengan memerhatikan entitas waria di Jakarta tahun 1968 (Ramadhan, 1984: 179). Perhatian pemerintah terhadap entitas waria, yaitu dengan mendengarkan aspirasi mereka yang menginginkan dengan diadakannya pelatihan kerja dan kehidupan yang layak. Mereka menjadikan Jakarta

sebagai *The Land of Dream* untuk merubah nasib dan kehidupan mereka. Komunitas waria datang ke Jakarta tidak memiliki keterampilan dan pekerjaan yang tetap, sehingga mereka secara paksa melakukan *nyebong* untuk menjalankan nasibnya sebagai pelacur di pinggir jalan dan rel kereta api.

Jakarta berkembang pesat sebagai kota metropolitan yang pembangunan ekonominya berkiblat ke Barat dengan menghadirkan diskotek, kasino, dan restoran pada tahun 1968. Berderetan diskotik, panti pijat tradisional, dan bar di Jalan Mangga Besar masih ramai sampai menjelang dini hari. Data Dinas Pariwisata DKI Jakarta menyebutkan sebanyak 156 bioskop berbagai kelas tersebar. Badan pegal dan linu-linu, bisa dibawa ke 224 panti pijat, yang sebagian besar mencantumkan papan nama panti pijat tradisional. Tempat santai yang menyajikan musik hidup, ada di 139 tempat, sedang yang suka berjingkat-jingkat di diskotek dapat memilih salah satu diantara 90 lokasi. Karaoke yang sedang trendi sudah ada 56 tempat, kelab malam ada 12 tempat, mandi uap ada di 14 tempat, dan 250 tempat main bilyar tersebar di lima wilayah kota. Sebagian di antara tempat-tempat itu baru usai ketika hari menjelang pagi (*Kompas*, 1991: 9). Lenggok dan sapa genit waria di Taman Lawang dan wanita-wanita penghibur sudah jadi milik kota, seperti pada gambar 1.

Gambar 1. Komunitas Waria *Nyebong* di Taman Lawang



Sumber: *Tempo*, 1993

Komunitas waria merupakan salah satu kelompok *subaltern* yang berada di Jakarta. Mereka tidak hanya penduduk asli Jakarta, tetapi perantau dari daerah lain seperti pada tabel 3.1. Mereka merantau untuk menjauhi keluarga yang tidak

menerimanya dan melarikan diri dari kotanya. Komunitas waria menganggap bahwa Jakarta merupakan kota yang dapat mendengar aspirasi dan basis berkumpul para waria. DKI Jakarta dipilih sebagai tempat merantau karena statusnya sebagai ibukota dan banyaknya fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk komunitas waria, seperti hadirnya diskotik, tempat pijat, dan karaoke. Gemerlap malam kota Jakarta diharapkan dapat memberikan kehidupan yang baru untuk komunitas waria. Mereka bekerja sebagai pelacur untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tabel 1. Asal-Usul Provinsi Waria di Jakarta Tahun 1985-1986

Asal Provinsi	Jumlah Waria	Persentase
DKI Jakarta	45	23,19%
Jawa Barat	46	23,71%
Jawa Tengah	18	9,27%
DI Yogyakarta	5	2,57%
Jawa Timur	9	4,63%
Sumatera Utara	26	13,40%
Provinsi Lainnya	43	22,16%
Tak Menjawab	2	1,03%
Total Keseluruhan	194	100%

Sumber: Atmojo, 1987: 14.

Berdasarkan tabel tersebut, Jawa Barat menduduki provinsi peringkat teratas dengan jumlah waria sebanyak 46 orang dengan persentase 23,71% yang tinggal di Jakarta. Peringkat kedua, yaitu DKI Jakarta dengan jumlah waria sebanyak 45 orang dengan persentase 23,19% dan peringkat ketiga diduduki oleh provinsi lainnya sebanyak 43 orang dengan persentase 22,16%. Peringkat keempat diduduki oleh Sumatera Utara dengan jumlah waria sebanyak 26 orang dengan persentase 13,40%. Jawa Tengah menempati urutan kelima sebagai provinsi asal entitas waria di Jakarta. Jawa Timur mendapatkan urutan ke-9 yang jumlah waria sebanyak 9 orang dengan persentase 4,63%. Provinsi terakhir, yaitu DI Yogyakarta dengan jumlah entitas waria pindah ke Jakarta sebanyak 5 orang dengan persentase 2,57%. Seperti yang dikatakan oleh Mami Yuli, Ketua Forum Komunikasi Waria Indonesia pada 14 Oktober 2023.

Komunitas waria membentuk sebuah kelompok berdasarkan asal daerah mereka, seperti Jakarta Utara dikuasai oleh komunitas waria yang berasal dari Makassar, Ambon, dan NTT. Jakarta Pusat dikuasai oleh komunitas waria yang berasal dari kalangan elit, Jakarta, dan Jawa Barat. Komunitas waria yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta menguasai daerah Jakarta Barat. Komunitas waria yang berasal dari Sumatera Utara, NTB, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan menguasai daerah Jakarta Timur. Jakarta Selatan dikuasai oleh komunitas waria yang berasal dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ambon, dan Jawa Barat. Masing-masing kelompok terdapat entitas waria yang menjadi preman untuk melindungi teman-temannya dari preman liar dan aparat kepolisian. Pembentukan kelompok tersebut disebabkan karena adanya kesamaan nasib dan penolakan dari keluarga mereka yang membuat harus merantau ke Jakarta.

B. Komunitas Waria di tangan Gubernur Ali Sadikin

Komunitas waria mengalami zaman keemasannya dari tahun 1968 sampai 1980. Gubernur Ali Sadikin mengatasi masalah komunitas waria yang jumlahnya mencapai 15.000 orang dengan memberikan pelatihan keterampilan dan lapangan kerja (*Kompas*, 1968: 2). Upaya tersebut sangat sulit karena masyarakat yang melakukan urbanisasi sangat banyak dan tidak bisa dihentikan. Gubernur Ali Sadikin dalam mengatasi masalah komunitas waria dengan melakukan pendekatan dan mengajak bicara tentang masalah-masalah mereka dan menempatkan mereka di tempat yang selayaknya.

Gubernur Ali Sadikin mengajak komunitas waria untuk meramaikan *Jakarta Fair 68*. Mereka membuat *stand* yang diisi dengan keterampilan, seperti menjahit, merangkai bunga, menata rias wajah dan rambut. Gubernur Ali Sadikin terkagum melihat kecantikan para entitas waria. Pengunjung *Jakarta Fair 68* masih tetap ramai dan tidak kalah ramainya dengan malam-malam pertama. Keramaian yang stabil itu berkat adanya kerja sama dari pihak penyelenggara *Jakarta Fair 68* dan para pemilik *stand-stand* dimana untuk lebih menarik perhatian publik di beberapa *stand* diadakan hadiah-hadiah yang cukup lumayan. Bahkan dari beberapa *stand*, seperti Lambretta, Deppen Honda, Sanyo dan lain-lain tidak kepalang tanggung mengeluarkan hadiahnya,

yaitu Lambretta, TV, sepeda motor, radio, dan masih banyak lagi jenis lainnya (*Kompas*, 1968: 5).

Jakarta Fair 1968 umumnya hanya golongan orang berduit saja yang dapat menikmati penampilan para artis dan grup musik. Sebab untuk masuk di arena itu, seperti *Varia Sweet Corner*, *Oriental Show*. Mereka harus membeli karcis terlebih dahulu dengan tarif minimum Rp. 150,-. Generasi muda kita dengan adanya tarif-tarif yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang berduit itu, rupa-rupanya juga ikut turutan dengan mengadakan pertunjukan-pertunjukan grup musik keliling *Jakarta Fair* 68 yang bersifat terbuka di atas panggung yang berjalan (*Rolling Stage*). Pertunjukan tersebut kualitasnya cukup baik dan tidak terlalu bersifat ugal-ugalan (*Kompas*, 1968: 5).

Gubernur Ali Sadikin pernah membangun diskotek yang dikhususkan dan dikelola oleh komunitas waria, yaitu bernama *Paradise Hall* yang berlokasi di Lapangan Merdeka (sekarang bernama Lapangan Monumen Nasional) pada tahun 1968. Diskotek tersebut selalu ramai dan dikunjungi tidak hanya komunitas waria saja, tetapi juga masyarakat umum. Ramainya pengunjung dikarenakan adanya penampilan yang selalu disuguhkan oleh komunitas waria di *Paradise Hall*, seperti tarian India, tarian Italia, tari pular, tari ular, sulap, dan bernyanyi. Jam operasional diskotek tersebut mulai dari pukul 21.00 sampai 02.00 WIB dan biasanya makin tengah malam akan selalu ramai dan menampilkan acara yang spektakuler (*Vista*, 1970: 8).

C. Politik Moralitas Pemerintah Orde Baru Terhadap Komunitas Waria

Indonesia di bawah pemerintah Orde Baru menerapkan pemerintahan yang otoriter dan menerapkan politik moralitas. Penerapan politik moralitas yang diterapkan oleh Orde Baru akan menimbulkan pembiasan gender di lingkungan masyarakat. Politik moralitas yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru diserap dari cerita Ramayana. Pemerintah Orde Baru digambarkan peduli dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat bawah (Sudewa, 1992: 3). Pelaksanaan politik moralitas pemerintah Orde Baru dengan melihat perbedaan secara nyata dalam konteks modernitas yang

membutuhkan globalisme secara berulang untuk membuat kenyataan tidak lengkap (Michell, 2000: 18).

Pemerintahan Orde Baru disebut banyak menggunakan kekerasan episodik dan kontrol otoriter yang memaksa. Kontrol otoriter yang penuh membuat pembangunan ekonomi berkembang pesat dengan perluasan ekonomi gaya kapitalis yang dapat menyebabkan kerusakan moral yang sering ditemui dalam kasus gender dan seksualitas sebagai proklamasi kecemasan gender (Robison, 1996: 98). Pembangunan ekonomi dan kontrol sosial dihubungkan sebagai penegasan arti sempit yang sebagai perwujudan dalam bentuk gender maskulinitas dan feminitas (Suryakusuma, 2011: 101). Adanya konsep ideologi gender yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru membuat komunitas waria berada di ujung tanduk kehidupan.

Dalam konsep Bapakisme Orde Baru, sosok laki-laki yang ideal digambarkan sebagai memiliki sifat kepemimpinan, dapat melindungi, bersifat bijaksana, memiliki aura kharismatik, dan paham mengetahui segalanya. Sedangkan manusia ideal untuk sosok perempuan diserap konsep ibuisme digambarkan sebagai perawat keluarga, mencukupi kebutuhan sehari-hari, melayani keluarga untuk menjaga keutuhan keluarga, patuh dan diam terhadap suami (Mustaffa, Priyatna, dan Adipurwawidjana 2022: 4). Indonesia melakukan politik moralitas dicirikan sebagai negara afektif tentang keterikatan heteronormativitas dan modernitas yang erat. Pembiasaan terjadi karena adanya ketidakadilan gender di suatu negara. Ketidakadilan gender dapat berbentuk marginalisasi, subordinasi, konvensional, kekerasan, dan beban kerja yang berat. Komunitas waria merupakan korban ketidakadilan gender yang bersifat subordinasi (Fakih, 1996: 5). Mereka sering mendapatkan kekerasan dan diskriminasi karena bayang-bayang gender yang berbeda dari seksualitas jenis kelaminnya.

Penampilan waria menjadi sorotan oleh masyarakat Indonesia karena mengenakan pakaian dan bertingkah seperti perempuan. Mereka mengenakan baju perempuan selutut dengan menggunakan sanggul dan sepatu hak untuk memperlihatkan kemolekan tubuh. Mereka juga mengikuti pakaian modern dan tidak bisa berpaling dari pengaruh *transnational global discourse* dalam memilih pakaian

sehari-hari. Mereka selalu merias wajah menggunakan gincu, maskara, *eyeliner*, dan *blush on* (Graham, 2004: 34). Mereka merias diri untuk bekerja sebagai pekerja seks. Tujuan merias diri untuk menarik para laki-laki mata keranjang untuk kepuasan gairah mereka.

Penangkapan waria yang dilakukan aparat telah melanggar HAM, seperti kekerasan fisik ketika melakukan proses penangkapan, menggunakan satu sel penahanan yang sama dengan pelaku kejahatan lainnya, pelayanan kesehatan dan makanan yang buruk, proses prosedur pembebasan yang tidak jelas, sulitnya mencari pekerjaan, dan fasilitas buruk yang didapatkan oleh para waria. Waria yang mangkal dan mengamen menjadi sasaran utama aparat untuk melakukan penertiban dan razia. Berdasarkan data dari Dinas Sosial DKI Jakarta, mereka yang ditangkap dengan jumlah 385 dimasukkan ke dalam satu sel yang sama dengan para pengamen, pengemis, dan orang gila pada tahun 1977. Banyak waria yang terjangkit penyakit HIV/AIDS yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus karena menjadi tanggung jawab negara, tetapi sel penjara mereka disatukan oleh para penjajah lain. Mereka dianggap seperti sampah yang harus dibersihkan dan dijadikan satu sel tahanan dengan berbagai macam pelaku kejahatan (Sa'dan, 2017: 128).

Tabel 2. Banyaknya Tuna Susila yang Liar di DKI Jakarta Menurut Wilayah Tahun 1971

No	Wilayah	Banyaknya Hasil Razia	Jumlah Razia	Ditampung
1.	Jakarta Pusat	101	9	-
2.	Jakarta Utara	525	22	232
3.	Jakarta Barat	241	31	70
4.	Jakarta Selatan	14	1	3
5.	Jakarta Timur	117	8	80
Jumlah		998	73	385

Sumber: Dinas Sosial DKI Jakarta 1971

Negara memakai politik gender sebagai senjata untuk meraih kekuasaan atau kemenangan dalam politik sebuah negara dan kepentingan ekonomi masyarakat (Oetomo, 1991: 86). Hal ini menyebabkan antara seksualitas dan negara saling

bersinambung untuk meraih kekuasaan. Negara dan kekuasaan menjadikan politik gender sebagai sumber pengetahuan untuk mengontrol seksualitas warganya. Pengontrolan yang dilakukan oleh negara dengan melakukan pengawasan tubuh dan seks melalui tindak wacana yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah opini mengenai seksualitas yang selalu diproduksi (Foucault, 1997: 12-13).

Pemerintah berupaya untuk mengamankan batas-batas maskulinitas dan feminitas mengenai pemahaman gender dan seksualitas di Jakarta. Pemerintah membuat konsep pemahaman gender berdasarkan biologis dan sistem reproduksi yang didasari oleh pendekatan disiplin desain yang berhubungan dengan tubuh dalam pembangunan modernitas nasional Indonesia. Maraknya kemunculan komunitas waria menjadi situasi politik krisis mengenai pengetahuan transnasional (Stoler, 1995: 210). Pemerintah Jakarta masih menghubungkan pemahaman transnasional gender maskulinitas dan feminitas dengan perilaku dan tubuh manusia dalam proses pembangunan modernitas nasional. Pembangunan modernitas nasional menjadikan pemahaman diskursif mengenai maskulinitas dan feminitas alamiah yang diklarifikasi dan diperebutkan dalam sebuah produk dari sejarah yang tatanannya padat dengan normativitas ras, kelas, dan nasional.

Seksualitas dijadikan sebagai senjata oleh sebuah rezim untuk mendapatkan panggung politik di suatu negara. Rezim pemerintah Orde Baru pernah melakukan ideologi gender untuk mendapatkan panggung politik. Pemerintah Orde Baru melakukan pengawasan seksualitas warganya dengan melakukan demonstrasi mengenai pernikahan heteronormativitas dan mengkonstruksikan tugas gender laki-laki dengan perempuan secara tegas. Pemerintah Orde Baru menerapkan ideologi gender bertujuan untuk mengembangkan perekonomian dan pembangunan yang menjadi tugas utama rezim orde baru setelah kerusuhan 1965 (Suryakusuma, 1991: 73). Mereka secara tegas melakukan rekonstruksi peran laki-laki dan perempuan dengan mendefinisikan seks secara sosial dan moral untuk menunjang program pembangunan nasional. Demonstrasi pernikahan heteronormatif dilakukan oleh pemerintah menyesuaikan dengan norma seksualitas agar tidak terjadi penyimpangan

dan ketidaknormalan yang membuat landasan negara untuk mendefinisikan kebijakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ideologi gender dibatasi dan menjadi sangat konsisten yang didukung oleh negara pada masa pemerintahan orde baru (Blackburn, 2004: 9). Pemerintah orde baru dalam menerapkan ideologi gender dengan membatasi konstruksi gender masyarakat, yaitu dengan mendemonstrasikan pembentukan keluarga heteronormatif, heteroseksual, dan paternalistik yang membentuk keluarga ideal di Indonesia. Pembentukan keluarga yang ideal dijadikan sebagai proses pembentukan industrialisasi, pembangunan ekonomi, dan mempropagandakan nilai-nilai gender dalam masyarakat Indonesia (Boellstroff, 2004: 216). Pemerintah melakukan propaganda dengan mengatakan negara adalah bagian dari keluarga yang mengusung nilai-nilai kemanusiaan (Suryakusuma, 1991: 73). Propaganda secara luas dilakukan untuk membentuk sebuah keluarga yang ideal melalui perkawinan heteroseksual yang memiliki anak-anak sebagai keturunan. Sedangkan, propaganda dalam arti sempit pemerintah mengatur peran gender baik laki-laki maupun perempuan yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia. UU tersebut mengontrol peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. UU tersebut juga secara tidak langsung mengatur mengenai perkawinan heteroseksual.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membuat komunitas waria khawatir akan eksistensinya yang diatur oleh negara. Kekhawatiran tersebut membuat komunitas waria meminta untuk dilokalisasikan di tempat yang lebih layak untuk terhindar dari razia aparat kepolisian pada tahun 1976. Gubernur Ali Sadikin dijadikan patron oleh komunitas waria karena telah mendengar permasalahan-permasalahan mereka. Adanya lokalisasi tersebut bertujuan untuk meresmikan daerah khusus komunitas waria melakukan prostitusi. Permintaan tersebut ditolak oleh Gubernur Ali Sadikin atas persetujuan Buya Hamka yang menurutnya tidak etis diadakan lokalisasi untuk komunitas waria. Komunitas waria merasa kecewa

dengan hasil tersebut dan turunnya Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta membuat mereka kembali ke jalan untuk melakukan *nyebong* (Ramadhan, 1993: 208).

Petugas telah menjaring sebanyak 2.214 warga yang melanggar ketertiban umum, yaitu 1.138 gepeng, 690 joki, 370 Wanita Tuna Susila (WTS), dan 16 waria pada tahun 1995. Mereka yang melanggar ketertiban umum hanya diberikan peringatan dan diberi hukuman *push up*. Hal tersebut untuk menertibkan warga ibukota sebagai proyek percontohan dalam Gerakan Disiplin Nasional (GDN). Operasi GDN beroperasi sekitar pukul 06.000 hingga 13.00 dan pukul 14.00 hingga pukul 20.00. Pemerintah dalam mendukung GDN telah memberikan fasilitas tempat pembinaan di Kedoya, Cipayang, dan Pondok Bambu. Waria yang terkena pelanggaran dibawa ke tempat pembinaan untuk diberikan pelatihan yang sesuai bakatnya agar tidak turun ke jalan lagi. Dinas Sosial Jakarta dalam melakukan operasi ketertiban komunitas waria menggunakan truk kebersihan milik Pemda DKI Jakarta. Hal tersebut untuk mengantisipasi para waria yang ingin meloncat dan lari dari mobil (*Kompas*, 1995: 6).

Sekelompok waria sedang memperagakan diri di pinggir jalan Pelabuhan Merak, MH. Thamrin, dan Imam Bonjol pada hari Jum'at malam untuk mencari laki-laki hidung belang di razia oleh Tim Keamanan DKI Jakarta. Razia tersebut bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat dan menertibkan keamanan kota yang telah diatur sebagai program Rencana Induk 20 Tahun (1965-1985). Program tersebut menertibkan para gepeng (gelandang dan pengemis) dan WTS (Wanita Tuna Susila) dengan membatasi dan melakukan resosialisasi serta mengedukasi mereka dengan penyuluhan dan praktik keterampilan dalam bekerja (*Kompas*, 1973: 3).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembahasan tentang kajian sejarah gender, khususnya mengenai komunitas waria,

belum mendapatkan perhatian dalam historiografi Indonesia. Adanya komunitas waria dianggap sebagai pelengkap sistem sosial dan budaya baru di Jakarta. Jakarta sebagai ibukota negara dengan pusat niaga dan ekonomi mampu berkembang menjadi kota metropolitan. Pemerintah Jakarta melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Banyaknya pendirian industri yang masuk meningkatkan pendapatan Jakarta. Hal ini disebabkan karena industri kecil mencakup kegiatan ekonomi yang melibatkan masyarakat yang amat besar jumlahnya. Adanya industri kecil dapat membantu pemerataan ekonomi masyarakat sekitar.

Pembangunan ekonomi Jakarta yang berkembang pesat membuat masyarakat luar daerah berbondong-bondong untuk bermigrasi ke Jakarta. Masyarakat luar daerah migrasi ke Jakarta tidak memiliki keterampilan, tetapi mereka memiliki tujuan untuk merubah nasib dan memperbaiki kehidupan mereka, salah satunya entitas waria. Komunitas waria memilih Jakarta sebagai *The Land of Dream* karena banyaknya tempat hiburan malam yang didirikan di Jakarta. Komunitas waria berjumlah 15.000 orang yang bertempat tinggal di Jakarta tahun 1968 dan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Tingginya jumlah komunitas waria membuat Gubernur Ali Sadikin untuk mengatasi masalah komunitas waria yang tidak memiliki keterampilan dengan mengajaknya untuk tampil di *Jakarta Fair*, memberikan pelatihan kecantikan, menata rambut, menjahit, dan merangkai bunga. Komunitas waria di tangan Gubernur Ali Sadikin membawa angin segar karena dianggap sebagai bagian dari masyarakat Jakarta.

Komunitas waria mengalami penurunan untuk tampil di depan publik ketika lengsernya Ali Sadikin sebagai gubernur Jakarta dan diterapkannya politik moralitas dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Penurunan itu disebabkan oleh adanya kebijakan perkotaan yang baru dengan mengintegrasikan antara politik moralitas kelas menengah dan pembangunan ekonomi global. Peran Orde Baru dalam menerapkan politik moralitas masyarakatnya diatur dengan Undang-Undang (UU) Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa gender laki-laki merupakan kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. UU tersebut mengatur pernikahan yang sah antara laki-laki

dan perempuan dan mengatur politik seksualitas heteroseksual di Indonesia. Secara tidak langsung, UU tersebut hanya mengakui hubungan perempuan dan laki-laki yang seksualitasnya diakui oleh negara.

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membuat praktek *nyebong* yang dilakukan oleh komunitas waria mengalami penurunan. Komunitas waria sering terkena razia dari aparat kepolisian karena telah mengganggu keindahan dan ketertiban kota Jakarta dengan melakukan praktik prostitusi di sepanjang jalan dan rel kereta. Pemerintah menerapkan sistem GDN di Jakarta. Operasi GDN beroperasi sekitar pukul 06.000 hingga 13.00 dan pukul 14.00 hingga pukul 20.00. Petugas telah menjaring sebanyak 2.214 warga yang melanggar ketertiban umum, yaitu 1.138 gepeng, 690 joki, 370 WTS, dan 16 waria pada tahun 1995. Pemerintah dalam mendukung GDN telah memberikan fasilitas tempat pembinaan di Kedoya, Cipayung, dan Pondok Bambu. Waria yang terkena pelanggaran dibawa ke tempat pembinaan untuk diberikan pelatihan yang sesuai bakatnya agar tidak turun ke jalan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir. 1934. "De transvestieten van Batavia", dalam *Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, 14 Agustus.
- Anonim. 1889. "Sinar Terang Betawi". *Sinar Terang*, Maret 2.
- Anonim. 1901. "Kabar Betawi". *Pemberita Betawi*, Mei 13.
- Anonim. 1968. "Di Djakarta Terdapat 15.000 Bantji". *Kompas*, Agustus 5.
- Anonim. 1968. "Jakarta Fair 68". *Kompas*, Juli 8.
- Anonim. 1969. "Razzia Wadam". *Kompas*, Januari 17.
- Anonim. 1970. "Profil Wadam". *Moderna*, Februari 13.
- Anonim. 1970. "Tjelah-Tjelah Kehidupan Wadam". *Vista*, Februari 28.
- Anonim. 1973. "Operasi Wadam di Ibukota". *Kompas*, Juli 9.

- Anonim. 1982. "Pembangunan Jakarta bukan dari Judi". *Berita Yudha*, April 5.
- Anonim. 1991. "Meneguk Rezeki di Tengah Malam". *Kompas*, Juni 30.
- Anonim. 1995. "Sebulan Gerakan Disiplin Nasional: Disiplin Warga Ibu Kota Belum Menggembirakan". *Kompas*, Juni 21.
- Anonim. 1998. "Terperangkap Kehidupan Gay". *Aksi*, November 20-23.
- Atmojo, Kemala. 1986. *Kami Bukan Laki-Laki: Sebuah Sketsa Kehidupan Waria*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Blackburn, Susan. 2004. *Woman and State in Modern Indonesia*. New York: Cambridge University Press.
- Boelstorff, Tom. 2004. "Playing Back the Nation: Waria, Indonesian Transvesties". *Journal Cultural Anthtopology* 19 (2): 159-250.
- Boellstorff, Tom. 2007. *A Coincidence of Desires: Anthropology, Queer Studies, Indonesia*. Durham, NC: Duke University Press.
- Daliman, A. 2015. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Dinas Sosial DKI Jakarta. 1977. *Razia untuk tuna susila yang liar di DKI Jakarta*.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, Michel. 1977. *Sejarah Seksualitas: Seks dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Graham, Sharyn. 2004. *Consuming the global: transgender subjectivities and the bodies in indonesia*. New Zealand: Auckland University of Technology.
- Hegarty, Benjamin Daniel. 2017. "Becoming Incomplete: The Transgender Body and National Modernity in New Order Indonesia (1967-1998)", Tesis, Australian National University.
- Indonesia. 1974. *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Isnani, Sri. 2022. "Waria dalam Sinema Indonesia Pada 1970-an Sampai 2011: Sebuah Tinjauan Historis". Skripsi, Universitas Gadjah Mada.

- Kartodirdjo, Sartono. 2016. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Michell, Timothy. 2000. *The Stage of Modernity*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Mustaffa, Rizki Zamzam, Aquarini Priyatna, dan Ari Adipurwawidjana. 2022. “Konstruksi Bapakisme dalam Film 27 Steps of May”, *Metahumaniora* 12 (1): 1-17.
- Oetomo. 1996. *Masculinity in Indonesia: Genders, Sexualities, and Identities in a Changing Society*. In *Framing the Sexual Subject: The Politics of Gender, Sexuality and Power*. Berkeley: University of California Press.
- Oetomo, Dede. 1991. “Homoseksualitas di Indonesia”, *Prisma*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Ramadhan K.H. 1993. *Bang Ali Demi Jakarta (1966-1977)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Robison, Richard. 1996. *The Middle Class and the Bourgeoisie in Indonesia.*” In *The New Rich in Asia: Mobile Phones, McDonalds and Middle-Class Revolution*. New York: Routledge.
- Rokhim, Abdul. 2019. “Tinjauan Hukum Mengenai Kasus Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Undang-Undang HAM dan Perspektif Hukum Islam”, *Focus UPMI* 8 (3): 115-123.
- Rowe, Emily. 2007. *Waria: Kami Memang Ada*, (Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
- Sa’dan, Masthuriyah. 2017. “Waria, Pemerintah, dan Hak Seksual: Kasus Implementasi Perda Gepeng di DIY”, *Nalar* 1 (2): 124-137
- Sriwidodo, Gatot. 1993. “Waria di Taman Lawang”. *Tempo*.
- Stoler, Ann Laura. 1995. *Race and the Education of Desire: Foucault’s History of Sexuality and the Colonial Order of Things*. Durham, NC: Duke University Press.
- Sudewa, Alex. 1992. “Mencari Sosok Seorang Hero”, *Majalah Kebudayaan Basis*. Januari XLI, No.1.

- Suparlan, Parsudi. 1984. *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungannya*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Suryakusuma, Julia. 1991. Seksualitas dalam Pengaturan Negara. *Majalah Prisma*, Jakarta: LP3ES Indonesia.
- Suryakusuma, Julia. 2011. *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan di Indonesia Orde Baru*. Depok: Komunitas Bambu.
- Wawancara. Dr. Yulianus Rettoblaut S.H, M.H. Pancoran Mas, Depok pada 14 Oktober 2023.